

BAB 5

PEMBAHASAN

5.1. Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif tiga Kelompok Usaha Bersama pada Komunitas Adat Terpencil di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pelaksanaan usaha ekonomi produktif tiga kube pada komunitas adat terpencil di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan bagian tak terpisahkan dalam pemberdayaan komunitas adat terpencil di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Pendanaannya sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah No. 32 tahun 2007 tentang APBD Kab. HSS, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah No. 028 Tahun 2007 tentang penjabaran APBD Kab. HSS tahun 2008, yang secara operasional dimasukkan dalam DPA SKPD Dinkessos dan PM Kab.HSS No. 1.13.1.13.01.15.01.52 tanggal 2 januari 2008. Tujuan pelaksanaan usaha ekonomi produktif dalam kaitan penguatan ekonomi pada komunitas adat terpencil ditetapkan terhadap individu (anggota) maupun kelompok, dalam bentuk kelompok-kelompok usaha bersama.

Dalam konteks ini Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Kessos dan PM Kab. HSS, melalui pelaksanaan usaha ekonomi produktif, berupaya meningkatkan pendapatan anggota dan kelompok sehingga pada akhirnya terbentuk penguatan ekonomi komunitas adat terpencil secara keseluruhan. Dalam konteks lebih lanjut, Dinas Kessos dan PM Kab. HSS secara substansi berupaya memberdayakan komunitas adat terpencil, yang memfokuskan pada kekuatan individu dan sosial (kelompok dan komunitas), agar mereka dapat mengambil keputusan dan menentukan sendiri tindakan yang akan dilakukan, tumbuh percaya diri untuk melakukan usaha ekonomi produktif sesuai potensi yang dimiliki, baik dari dalam diri (individu maupun kelompok) maupun lingkungannya, guna melepaskan diri

dari keterpencilan, sehingga mampu mengatasi akses hambatan geografis, mengatasi keterbelakangan secara psikologis dan kemiskinan. Kebijakan tersebut sejalan dengan konsep pemberdayaan sebagaimana dikemukakan Hikmat dan Payne dalam Adi (Bab 2 hal 30).

Dalam tataran lebih lanjut diharapkan, pemberdayaan yang dalam konteks merupakan pengembangan komunitas maka anggota dan kelompok memiliki sebuah kegiatan aktif yang mensyaratkan adanya perubahan pada komunitas adat terpencil ke arah yang lebih baik, meningkatkan harkat dan martabat golongan (KAT) yang dikategorikan sebagai orang-orang kurang beruntung atau kelompok rentan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, agar dapat menjangkau sumber-sumber produksi yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatannya, serta memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan. Pemikiran ini sejalan dengan konsep pemberdayaan sebagaimana yang ditegaskan Machendrawaty dan Safei, Adams, Ife dan Suharto (Bab 2 hal 30-31).

Dalam pelaksanaannya pemberdayaan dengan orientasi memperkuat ekonomi komunitas adat terpencil melalui usaha ekonomi produktif, oleh Dinas Kessos dan PM Kab. HSS dilakukan sebagai sebuah program (tahun 2008) dan proses untuk memberdayakan komunitas adat terpencil di Desa Hamak Utara. Dalam konteks ini, pelaksanaan usaha ekonomi produktif sebagai upaya penguatan ekonomi komunitas adat terpencil menekankan pada aspek manusia dan partisipasi. Karenanya, bentuk intervensi yang dilakukan adalah melalui pengembangan masyarakat. Dengan keterlibatan masyarakat, baik secara pemikiran, fisik, dan materiil diharapkan dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki hasil pembangunan (usaha ekonomi produktif) pada komunitas. Apa yang dilakukan Dinas Kessos dan PM Kab. HSS, tentang pelaksanaan usaha ekonomi produktif, mengadopsi aspek pengembangan masyarakat, dilihat dari ciri utamanya : a) tujuan dari pelaksanaan usaha ekonomi produktif adalah memampukan masyarakat untuk mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan, b) proses pelaksanaannya melibatkan aktivitas dan kerjasama kelompok-kelompok (kubek) dalam masyarakat dan c) praktisi yang

menggunakan model intervensi lebih banyak menggunakan pendekatan pengembangan masyarakat yang bersifat *non-directif* (partisipasi) tetapi untuk mempercepat pelaksanaannya melalui fasilitasi pendamping kube. Sementara *non-directif* menjadi pilihan karena dalam pelaksanaan usaha ekonomi produktif, Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan, melalui Dinas Kessos dan PM Kab. HSS hanya menyediakan dana bantuan modal usaha. Kelompok usaha secara partisipatif diberikan ruang yang seluas-luasnya kepada mereka untuk menentukan penggunaan dan pengelolaan modal usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan setempat melalui fasilitasi pendamping, sehingga usaha dapat berkembang dan mampu mensejahterakan anggota dan kelompoknya. Dengan pendekatan *non-directif*, Dinas Kessos dan PM Kab. HSS berupaya mempercayakan kepada warga masyarakat, mereka yang mengetahui apa yang dibutuhkan dan apa yang baik untuk mereka. Apa yang dilakukan Dinas Kessos dan PM Kab. HSS selaras dengan ciri dan pendekatan dalam pengembangan masyarakat sebagaimana dikemukakan Glen dalam Adi dan Batten dalam Adi (Bab 2 hal 32-33).

Pelaksanaan usaha ekonomi produktif, selain merupakan bentuk pemberdayaan komunitas adat terpencil, pada sisi lain, merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada usaha kecil atau yang dikenal sebagai ekonomi rakyat. Untuk kawasan Desa Hamak Utara berkisar pada jenis usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Usaha-usaha tersebut dijalankan dalam skala terbatas dan subsisten, diprioritaskan untuk pasar sendiri atau dipasarkan dalam jangkauan terbatas agar berbagai potensi masyarakat dapat berkembang dan memperkuat potensi ekonomi atau daya saing yang dimiliki komunitas adat terpencil. Usaha ini selaras dengan penegasan tentang konsep usaha kecil atau ekonomi rakyat yang dikemukakan Ismawan, Dewayanti dan Chotim dan Sumodiningrat (Bab 2 hal 47-49).

Untuk komprehensifnya pembahasan, berikut akan diuraikan secara mendalam pelaksanaan usaha ekonomi produktif tiga kelompok usaha bersama pada komunitas adat terpencil di Desa Hamak Utara Kec. Telaga

Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan, Prov. Kalimantan Selatan, sebagaimana berikut ini :

5.1.1. Persiapan

Dalam tahap persiapan pelaksanaan usaha ekonomi produktif tiga kelompok usaha bersama pada komunitas adat terpencil di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana mekanisme yang ditetapkan, diantaranya Dinas Kessos dan PM Kab. HSS menyediakan alokasi anggaran, petugas di kabupaten (pelaksana kegiatan), pendamping (yang menjadi media penghubung/fasilitator dan pendampingan pada kelompok sasaran), termasuk ketersediaan honor para petugas dalam menunjang pelaksanaan peran dan fungsinya, baik menjalin kontak dengan tokoh formal/informal maupun kelompok sasaran, serta mengkomunikasikannya dengan kelompok sasaran dan pihak-pihak terkait), selain itu terdapat dukungan prasarana dan sarana, seperti transportasi dan lain-lain yang dimiliki institusi tersebut untuk menjangkau lokasi, baik untuk penyerahan bantuan, monitoring dan evaluasi (Bab 4 hal 77-79).

Namun apabila ditelaah secara mendalam, apa yang dilakukan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki kelemahan mendasar yaitu :

- Tidak dilaksanakannya penyamaan persepsi secara sistematis bagi para pelaksana (di tingkat pemerintah) dan pendamping, yang dilakukan hanya sebatas pengarahan terbatas sehingga mempengaruhi pemahaman dan pengetahuan pelaksana dan pendamping dalam pelaksanaan peran dan fungsinya masing-masing secara efektif dan efisien. Tidak adanya penyamaan persepsi di kalangan pelaksana, khususnya pelaksana di Dinas Kessos dan PM Kab. HSS. Pelaksana di Dinas Kessos dan PM Kab. HSS (Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial cuma sekedar melaksanakan program sebagai suatu kegiatan rutin, anggaran diusulkan, dikeluarkan dan dilaporkan, yang apabila tahun anggaran berakhir, dianggap selesai dan dilaporkan telah dilaksanakan program tersebut dengan hasil yang baik (bahkan dengan ukuran statistik dianggap 100%).

Secara substansi dalam konteks pelaksanaan usaha ekonomi produktif di komunitas adat terpencil, pihak Dinas Kessos dan PM Kab. HSS, melalui bidang pembinaan dan pemberdayaan sosial sedang melakukan intervensi komunitas dengan kerangka kebijakan/pemikiran pengembangan masyarakat. Didalam pengembangan masyarakat terkandung paradigma, strategi dan teknik, yang apabila keliru dalam pelaksanaannya akan berdampak buruk, baik bagi program maupun komunitas itu sendiri, tidak saja kegagalan program untuk mencapai tujuannya yaitu penguatan ekonomi pada komunitas, tetapi dapat merusak tatanan sistem sosial, ekonomi dan budaya komunitas adat terpencil.

- Tidak dilaksanakan penyamaan persepsi dan peningkatan pengetahuan serta kompetensi kependampingan sosial dan kewirausahaan oleh Dinas Kessos dan PM Kab. HSS bagi pendamping sebelum melakukan pendampingan sosial. Kenyataan ini membawa pengaruh besar pada proses pendampingan kelompok. Walaupun pendamping berpengalaman dalam pendampingan sosial (karena berstatus pekerja sosial masyarakat) maupun mengetahui kondisi masyarakat setempat (sebagai aparat desa), hal tersebut belum cukup, sebab pendampingan usaha ekonomi produktif memerlukan pendamping yang memahami kelompok sasaran, nilai dan kebiasaan, kewirausahaan secara komprehensif, memiliki pemikiran profit (bagaimana mencari keuntungan dalam pelaksanaan usaha). Selain berjiwa sosial, pendamping seharusnya mempunyai keterampilan untuk merubah kebiasaan/pola pikir kelompok sasaran. Dengan keterbatasan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki pendamping ditambah dengan tidak dilaksanakannya bimbingan teknis pendampingan usaha ekonomi produktif dan kewirausahaan, menyebabkan pendamping tidak mampu mengemban perannya untuk mendukung dan menjamin usaha kelompok mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan kelompok sebagaimana tujuan program tersebut.
- Tidak adanya studi kelayakan yang komprehensif dalam pemilihan kelompok sasaran pada KAT yang ditetapkan. Sasaran dipilih tanpa melalui tahapan seleksi dengan kriteria tertentu, ketentuan pembatasan

kelompok sasaran yang ditindaklanjuti pengajuan dari masyarakat dengan jumlah yang sama menyebabkan tidak ada kompetisi untuk mendapatkan bantuan tersebut. Studi kelayakan diperlukan untuk menilai potensi, kemauan kelompok, tanggung jawab, komitmen untuk bekerja keras dan penilaian prospek ke depan tentang usaha yang dipilih agar dapat merubah kehidupan. Dengan studi kelayakan dapat diketahui mana kelompok yang memiliki potensi yang dapat mendukung usaha, berprospek ke depan dan dilaksanakan oleh individu dan kelompok yang memiliki kesadaran, tanggung jawab, komitmen untuk bekerja keras yang tinggi. Dengan kondisi tersebut usaha kelompok diharapkan dapat tumbuh dan berkembang sehingga mampu membawa dampak peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.

Berdasarkan kenyataan tersebut, pelaksanaan usaha ekonomi produktif sebagai bentuk pelaksanaan pengembangan masyarakat yang dilakukan Dinas Kessos dan PM Kab. HSS kurang sesuai dengan konsep tahapan persiapan dalam pengembangan masyarakat sebagaimana dikemukakan Adi (Bab 2 hal 33-34), dimana kelemahan-kelemahan tersebut perlu dilaksanakan.

Dinas Kessos dan PM Kab. HSS seharusnya menyadari bahwa apa yang dilakukan pada komunitas adat terpencil melalui pelaksanaan usaha ekonomi produktif merupakan bentuk intervensi komunitas yang memerlukan pemahaman komprehensif pada pelaksana di tingkat pemerintah, terutama yang berkaitan paradigma, strategi dan teknik intervensi pengembangan masyarakat di komunitas adat terpencil. Pendamping yang diperlukan : mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk mendekati masyarakat, melakukan intervensi dalam kehidupan dan perubahan sikap. Secara tidak langsung perubahan dalam kehidupan dan sikap dapat dilihat kalau mereka dapat merasakan dampak dari program.

Oleh karena itu, kompetensi dalam pendampingan sosial tidak saja hanya memahami pelaksanaan usaha ekonomi produktif tetapi juga memahami kewirausahaan, seleksi dan peningkatan kompetensi pendamping melalui pelatihan seharusnya dilaksanakan. Hal yang sama juga berlaku di

tingkat kelompok, perlu adanya seleksi dan pelatihan kewirausahaan yang lebih komprehensif sebelum pelaksanaan usaha ekonomi produktif dilaksanakan di tingkat kelompok. Seleksi diperlukan agar terpilih individu dan kelompok yang memiliki kesadaran, tanggung jawab, komitmen untuk bekerja keras, sedangkan pelatihan diperlukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis tentang usaha ekonomi produktif dan kewirausahaan, sehingga pada saat melaksanakan usaha di tingkat kelompok mereka dapat melakukan operasionalisasi usaha, mampu mengatasi hambatan, menyelaraskan kebutuhan dan potensi setempat, mengembangkan usaha, membentuk jaringan kerjasama, pemasaran hasil dan dapat menjangkau permodalan. Keberhasilan usaha yang dirasakan dapat mempengaruhi apa yang ingin dicapai dan dilaksanakan untuk masa depan.

5.1.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dimulai dari tahapan sosialisasi, pembentukan kelompok, di dalamnya termasuk pembentukan pengurus, pemilihan jenis usaha dan pengajuan proposal bantuan usaha), selanjutnya bantuan usaha tersebut dikelola secara berkelompok. Untuk jelasnya pembahasan masing-masing tahapan tersebut dapat dilihat pada bagian berikut :

5.1.2.1. Sosialisasi

Tahap sosialisasi pelaksanaan usaha ekonomi produktif tiga kelompok usaha bersama pada komunitas adat terpencil di Desa Hamak Utara dilaksanakan dengan cara mengkomunikasikannya dengan kelompok sasaran dan pihak-pihak terkait, dengan aparat kecamatan, aparat pemerintah desa dan masyarakat setempat (Bab 4 hal 79-80).

Dalam pelaksanaannya, sosialisasi ini ternyata hanya berupa pemberitahuan tentang program, tujuan, besarnya bantuan dan mekanisme mendapatkannya, tanpa ada upaya pemberian motivasi kepada komunitas adat terpencil tentang gambaran substansi usaha ekonomi produktif. Kegiatan ini merupakan upaya sistematis pemerintah agar komunitas adat terpencil dapat meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas

kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan, yang dapat mempengaruhi pola kehidupan KAT.

Secara singkat, usaha ekonomi produktif merupakan alternatif kegiatan komunitas adat terpencil selain bertani dan menyadap karet yang selama ini dilakukan. Usaha pemerintah menanamkan nilai-nilai baru bagi komunitas, bagaimana melakukan usaha secara berkelompok yang sesuai potensi setempat, bekerjasama, berdemokrasi, ketika melakukan rapat kelompok untuk memutuskan sesuatu, mengembangkan kemitraan dengan pihak-pihak terkait, yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan kelompok serta komunitas. Hal-hal tersebut tentu merupakan hal baru bagi komunitas dan tidak mungkin terwujud hanya dengan sosialisasi satu kali di awal kegiatan ketika program akan dilaksanakan.

Sosialisasi sebenarnya dapat merupakan upaya untuk melahirkan kesadaran kolektif, sehingga individu dan kelompok kemudian dapat mewujudkannya melalui partisipasi dan kemauan secara serius, tercipta antusiasme, tanggung jawab dan komitmen untuk bekerja keras dan terlibat aktif melaksanakan program. Kesadaran kolektif diperlukan agar program mampu mencapai tujuan sebagaimana telah ditetapkan, dan kesadaran kolektif memerlukan polesan intensitas sosialisasi secara lebih sistematis dan komprehensif agar kesadaran tumbuh dan berkembang untuk mendukung program. Substansi ini tampaknya dilewatkan oleh Dinas Kessos dan PM Kab. Hulu Sungai Selatan. Hal ini dimungkinkan karena dalam pelaksanaan usaha ekonomi produktif telah dilakukan melalui fasilitasi pendamping pada masing-masing kelompok sasaran. Dinas Kessos dan PM Kab. HSS memiliki pemikiran sosialisasi yang berupa penanaman kesadaran dan motivasi dapat dilakukan pendamping kepada kelompok sasaran. Hal ini terlihat dari pemberian kewenangan yang besar kepada pendamping dalam menjalankan fungsinya. Pemerintah (Dinas Kessos dan PM Kab.HSS) setelah memberikan modal bantuan usaha, kemudian mendelegasikan fungsi pendampingan kepada pendamping. Apakah usaha tersebut dapat berhasil akan sangat tergantung usaha yang dilakukan pendamping pada kelompok sasaran.

Melihat kenyataan sebagaimana tersebut di atas maka dalam konteks ini Dinas Kessos dan PM Kab.HSS memiliki kelemahan mendasar, diantaranya :

- Dengan memberikan kewenangan penuh kepada pendamping tetapi tidak diikuti dengan pelatihan pendampingan usaha ekonomi produktif dan kewirausahaan sama saja dengan melepas pendamping tanpa dibekali alat untuk melaksanakan tugasnya.
- Kewenangan yang besar tersebut ternyata juga tidak didukung dengan alokasi honorarium yang memadai selama proses pendampingan, sehingga pendamping tidak fokus melakukan proses pendampingan usaha, karena harus menjalankan pekerjaan mereka terlebih dahulu, sebelum melakukan pendampingan.
- Pelaksanaan program tersebut terkesan hanya untuk menjalankan rutinitas sebagaimana tahun-tahun anggaran sebelumnya, dan tidak ada upaya sistematis untuk menjadikan program agar dapat berhasil secara substansi. Pendampingan dapat direncanakan hari/minggu yang mana mereka akan selalu hadir dan dalam keadaan terpaksa bagaimana mereka dapat dihubungi..

Namun, apabila Dinas Kessos dan PM Kab. HSS mengartikan sosialisasi pada komunitas sasaran sebagai penyampaian informasi, maka pilihan sosialisasi yang memberi kesadaran dan motivasi kolektif komunitas dapat dilakukan pendamping. Oleh karenanya optimalisasi peran pendamping mutlak diperlukan. Dalam konteks ini, sosialisasi yang dijalankan pendamping lebih menitikberatkan pada pembelajaran masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat dapat belajar kepada pendamping dan pendamping pun dapat belajar dari masyarakat tentang nilai, kebiasaan-kebiasaan KAT yang perlu diketahui oleh pendamping, sehingga kesetupaduan pemahaman akan melahirkan kesadaran, motivasi dan kemauan untuk melaksanakan program secara bertanggung jawab, bukan untuk kepentingan pendamping atau pemerintah tetapi juga untuk kepentingan kelompok sasaran sendiri. Untuk mendukung hal tersebut maka pendamping memerlukan anggota kelompok yang dapat dipilih dan

dipersiapkan untuk menggantikan perannya sesudah berakhirnya masa tugas pendamping.

Kalau itu menjadi pilihan maka Dinas Kessos dan PM Kab. HSS perlu mengoptimalkan perannya dalam pembinaan pendamping, monitoring dan evaluasi proses pendampingan dan hasil pelaksanaan usaha ekonomi produktif di kelompok sasaran. Peran yang dijalankan tersebut tidak hanya sebatas menerima laporan tetapi perlu melakukan monitoring dan evaluasi pada kelompok sasaran secara berkala dan berkesinambungan. Dengan upaya tersebut, substansi dari pelaksanaan usaha ekonomi produktif dalam upaya penguatan ekonomi komunitas adat terpencil dapat terwujud.

Intinya, komunikasi (sosialisasi program) yang baik pada tahap awal biasanya akan mempengaruhi keterlibatan warga pada fase berikutnya, hal ini ditegaskan Adi (Bab 2 hal 34) sebagai fase *engagement* dalam suatu proses pemberdayaan masyarakat.

5.1.2.2. Pembentukan kelompok

Secara prosedur pembentukan kelompok di lapangan telah sesuai dengan yang ditetapkan, masyarakat secara kolektif dengan kesadaran sendiri, membentuk kelompok-kelompok usaha bersama, membentuk pengurus (ketua, sekretaris, bendahara dengan variasi jumlah anggota, kube Serumpun 5, kube Maju Bersama dan Pelopor masing-masing 6, lebih sedikit dari ketentuan 10KK/kelompok) dan memiliki jenis usaha yang dapat dilaksanakan, yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan setempat.

Terdapat dua hal positif yang dilakukan dalam pemilihan jenis usaha tersebut antara lain :

- Dalam pemilihan jenis usaha telah melalui identifikasi masalah, berupa kebutuhan yang dirasakan (*felt needs*), yaitu kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sembako (kube Serumpun), memenuhi kebutuhan beras (kube Maju Bersama) dan memenuhi kebutuhan pupuk untuk pertanian dan pembekuan karet (kube Pelopor), kebutuhan tersebut kemudian diekspresikan (*expressed needs*), yaitu perlunya menyediakan sembako (kube Serumpun), perlunya menyediakan beras (kube Maju Bersama) dan

perlu menyediakan pupuk (kube Pelopor). Proses pengkajian tersebut dilakukan secara berkelompok (*group assessment*). Berdasarkan identifikasi kebutuhan, melalui fasilitasi pendamping dicari alternatif kegiatan usaha yang paling cocok

- Peran pendamping yang menonjol walaupun dalam tataran terbatas dalam tahapan ini adalah upaya untuk menyampaikan informasi tentang usaha ekonomi produktif, membantu kelompok sasaran mengartikulasikan kebutuhan dan masalah mereka, selain itu pendamping juga berperan untuk memformulasikan gagasan kelompok dalam bentuk tertulis hingga penyusunan proposal bantuan, yang akan diserahkan kepada Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Bab 2 hal 42)

Namun apabila dikaji lebih mendalam, pembentukan kelompok ini memiliki kelemahan antara lain :

- Pemilihan keanggotaan lebih didasarkan kedekatan tempat tinggal, bukan karena kesatuan motivasi untuk berusaha. Padahal kesatupaduan motivasi dapat menjadi kekuatan perubahan yang sangat strategis untuk membangun usaha ke arah kemajuan kelompok.
- Pemilihan jenis usaha didasarkan kebutuhan sesaat (pada waktu itu) bukan berdasarkan orientasi ke depan dengan mempertimbangkan potensi (alam dan masyarakat) dan kebutuhan masyarakat sebenarnya dari masing-masing kelompok.
- Pendamping tidak ada upaya untuk memberikan gambaran pilihan usaha tentang prospek, perkembangan dan dampaknya ke depan. Pendamping hanya meneruskan apa yang sudah dipilih kelompok, tanpa ada upaya penjelasan gambar tentang pilihan, kemungkinan hasil dan dampaknya di masa depan.

Dalam perspektif pengembangan masyarakat pembentukan ketiga kelompok (kube Serumpun, kube Maju Bersama dan kube Pelopor), penentuan jenis usaha dan pengajuan proposal bantuan kepada Dinas Kessos dan PM Kab. HSS terkait dengan kerangka berpikir merupakan tahapan *assessment*, tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan dan tahap

memformulasikan rencana aksi dalam intervensi komunitas pengembangan masyarakat sebagaimana dikemukakan Adi (Bab 2 hal 34-35), sementara pendamping dalam tahap ini menjalankan perannya sebagai pendidik/*educator* (menyampaikan informasi tentang usaha ekonomi produktif), pemercepat perubahan/*enabler* (membantu kelompok sasaran mengartikulasikan kebutuhan dan masalah mereka), dan perantara/*broker* (memformulasikan gagasan kelompok dalam bentuk tertulis hingga penyusunan proposal bantuan, yang akan diserahkan kepada Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan). Peran yang dijalankan pendamping tersebut memang masih dalam tataran terbatas dari banyak peran yang dimiliki seorang *community worker* sebagaimana dikemukakan Adi, Iff dalam Adi dan Mayo dalam Adi (Bab 2 hal 42-44)

5.1.2.3. Pelaksanaan usaha

Berdasarkan kondisi sebenarnya, pelaksanaan ketiga kube ini mengalami perubahan usaha yang relatif bervariasi. Kube Serumpun mengalami perubahan usaha, dari jual beli sembako, jual bensin eceran dan peminjaman uang untuk modal usaha anggota. Pada kube Maju Bersama pelaksanaan usaha ekonomi produktif mengalami perubahan dari usaha jual beli beras menjadi usaha jual beli karet, sedangkan kube Pelopor, pelaksanaan usaha kelompok ini relatif bermasalah sejak awal penerimaan bantuan, karena ketidaksesuaian antara bantuan yang diharapkan (SP36) dengan yang diberikan (SP27).

Dalam perspektif pengembangan masyarakat tahapan pelaksanaan usaha ini merupakan tahap implementasi/pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan masing-masing kelompok usaha ekonomi produktif, sebagaimana dikemukakan Adi (Bab 2 hal 35).

Selama pelaksanaan usaha ketiga kube tersebut, beberapa kelemahan yang dapat diidentifikasi antara lain adalah :

- Setiap pengambilan keputusan jenis usaha baru sebagai upaya mengatasi masalah selalu berdasarkan kondisi sesaat pada waktu itu, tidak dalam

perspektif berorientasi ke masa depan dan tidak mempertimbangkan potensi dan prospek usaha tersebut ke depan.

- Pendamping tidak ada usaha untuk memberikan pendampingan secara benar kepada masing-masing kelompok, baik memberikan informasi yang benar tentang usaha kelompok yang dipilih, prospeknya ke depan, kesesuaian potensi setempat, keterkaitan dengan pihak lain, dan gambaran dampaknya kepada pendapatan anggota dan kelompok. Apalagi untuk memperkuat kapasitas kelompok, memfasilitasi akses pada modal dan pasar, jaringan kerjasama dengan pihak lain agar usaha dapat bertahan, berkembang dan berkelanjutan.
- Kenyataannya, saat ini ketiga usaha kube tersebut mengalami stagnansi/tidakberkembang (Bab 4 hal 85-91)

Karena kondisi demikian maka pada masa depan, tahap pelaksanaan usaha tersebut perlu langkah-langkah :

- Kelompok perlu mempertimbangkan pilihan jenis usaha yang lebih baik yang ingin dikembangkan, berdasarkan keputusan kolektif dengan pertimbangan kebutuhan dan potensi setempat serta berprospek bagi pendapatan anggota dan kelompok, melalui fasilitasi pendamping, kepemimpinan yang demokratis dan keaktifan secara kolektif semua anggota dalam menjalankan usaha.
- Pendamping perlu mengintensifkan pendampingan usaha dan dilakukan secara berkala serta berkesinambungan. Pendamping perlu memosisikan diri sebagai pemercepat perubahan bagi kelompok, khususnya dalam memperkuat kapasitas kelompok untuk berusaha, pendamping juga perlu memberikan informasi dan menjelaskan prospek perubahan usaha yang dipilih kelompok, kesesuaian dengan potensi yang dimiliki kelompok dan dampaknya bagi peningkatan pendapatan anggota dan kelompok sehingga mampu memperkuat ekonomi kelompok dan komunitas. Pendamping juga perlu menjadi penghubung (*broker*) bagi kelompok dengan dunia luar, baik dalam mendapatkan akses modal pada lembaga keuangan maupun perbankan maupun akses pada pasar dan jaringan kerjasama dengan kalangan swasta lainnya.

5.2.5. Administrasi Pengelolaan Usaha

Kenyataan menunjukkan bahwa, pada umumnya pengelolaan usaha ketiga kube tersebut dilakukan ketua kube yang bersangkutan (kube Serumpun oleh ketuanya MA, kube Maju Bersama oleh ketuanya Ta dan Kube Pelopor oleh ketuanya Ma), sedangkan pencatatan usaha bagi Kube Serumpun dan Maju Bersama dilakukan dalam arti yang terbatas, sekedar berapa dana yang tersedia (saldo usaha) sedangkan Kube Pelopor justru tidak ada pencatatan sama sekali, Sementara itu, pendamping ada upaya memberikan pengetahuan dan keterampilan administrasi usaha sejak awal pelaksanaan usaha walaupun dalam kapasitas terbatas, sekedar pencatatan keluar masuk uang, namun dalam aplikasinya justru tidak dilaksanakan kelompok dan tidak ada pemantauan (Bab 4 hal 91-95).

Dalam perspektif pengembangan masyarakat kegiatan administrasi pengelolaan usaha ekonomi produktif merupakan bagian dari tahap implementasi, monitoring dan evaluasi, sebagaimana dikemukakan Adi (Bab 2 hal 35-37).

Namun beberapa kelemahan administrasi pengelolaan usaha pada ketiga kube tersebut antara lain :

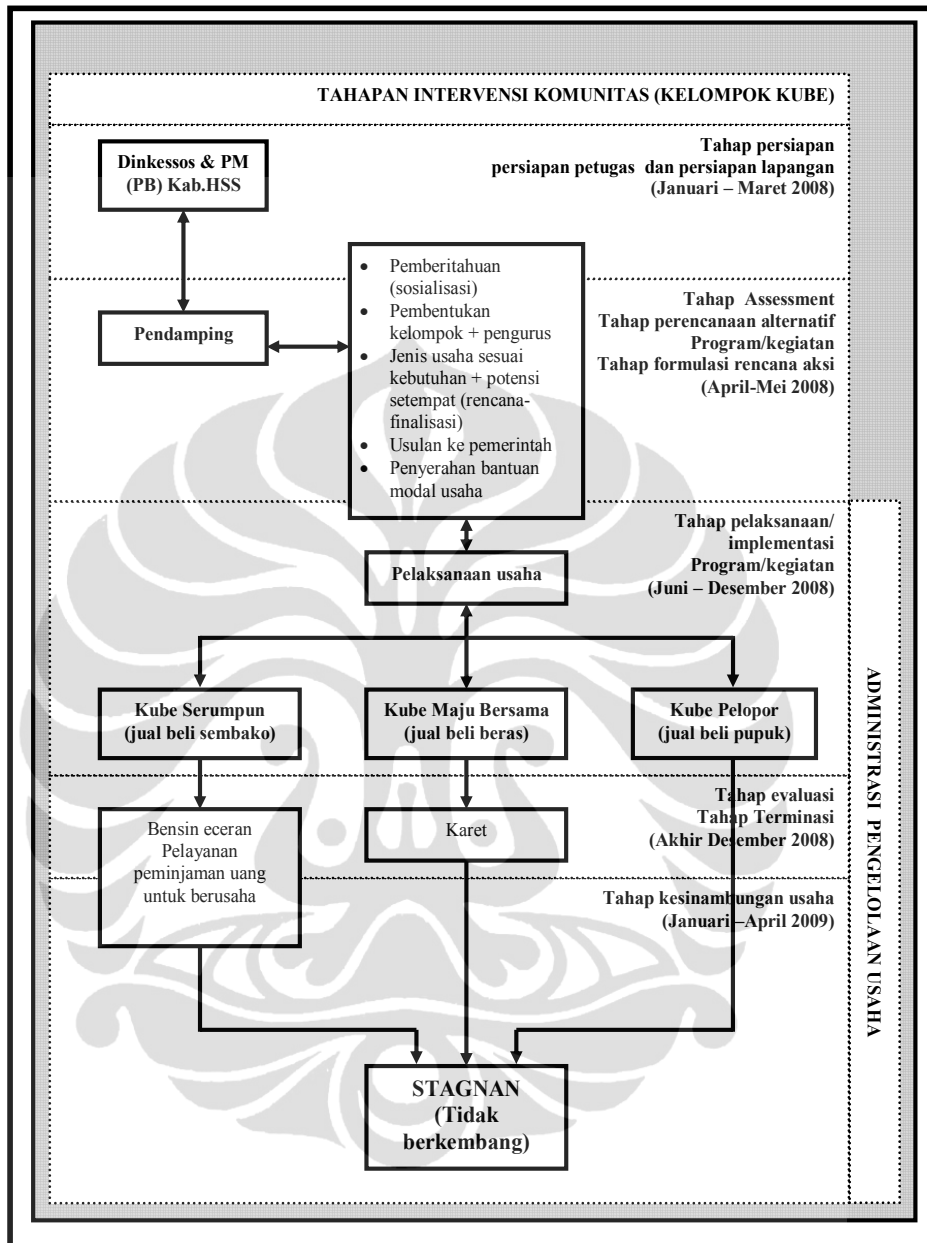
- Pengurus ada tetapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tidak ada pembagian tugas yang jelas.
- Administrasi pengelolaan usaha di masing-masing kelompok kurang baik. Ketiga kelompok tidak ada upaya melaksanakan : perencanaan usaha, pemasaran, akses pada modal dan kerjasama dengan pihak ketiga, monitoring dan evaluasi.
- Pendamping sekedar memberikan pembelajaran pencatatan secara sederhana, tetapi rendah dalam upaya membangkitkan motivasi anggota agar lebih tertarik, memiliki kesadaran sebagai anggota kelompok yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan usaha. Faktanya, usaha dipercayakan kepada ketua, sementara anggota lebih mengutamakan pekerjaan bertani dan menyadap karet.

Untuk perbaikan ke depan pendamping perlu memberikan pembelajaran secara serius kepada kelompok dalam hal :

- Kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab pengurus dan anggota. Pembagian tugas dan tanggung jawab dilaksanakan secara proporsional, dilandasi kesadaran untuk memajukan usaha kelompok.
- Kewajiban melakukan administrasi usaha, khususnya pencatatan usaha secara lebih tertib, sehingga memudahkan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan usaha.
- Perlunya perencanaan usaha, pemasaran, pembukaan akses pada modal dan kerjasama dengan pihak ketiga, dalam upaya pengembangan usaha.

Yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya menumbuhkan kesadaran, rasa memiliki dan motivasi anggota kelompok untuk terlibat dalam kegiatan usaha, sehingga usaha tersebut dapat menjadi kekuatan ekonomi kolektif di tingkat komunitas adat terpencil. Masalah motivasi dan kesadaran ini menjadi penting dalam kaitannya dengan usaha ekonomi produktif sebagai upaya pengembangan ekonomi. Hal-hal tersebut di atas merupakan strategi dalam pemberdayaan usaha kecil sebagaimana dikemukakan Florus, Firdaus dalam Kuwanda dan Midgley (Bab 2 hal 49). Dengan upaya tersebut diharapkan pelaksanaan usaha ekonomi produktif tiga kelompok usaha bersama pada Komunitas Adat Terpencil di Desa Hamak Utara tersebut dapat berhasil mencapai tujuannya

Berikut matrik ringkasan pelaksanaan usaha ekonomi produktif tiga kelompok usaha bersama pada komunitas adat terpencil di Desa Hamak Utara sebagai sebuah model intervensi komunitas pengembangan masyarakat.



Gambar 5.1. Matrik ringkas pelaksanaan usaha ekonomi produktif tiga kelompok usaha bersama pada komunitas adat terpencil di Desa Hamak Utara sebagai sebuah model intervensi komunitas pengembangan masyarakat

Sumber : telah diolah kembali

5.2. Faktor-Faktor pendukung/penghambat Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif Tiga Kelompok Usaha Bersama pada Komunitas Adat Terpencil di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan.

5.2.1. Faktor pendukung

5.2.1.1. Dukungan finansial pemerintah

Salah satu faktor pendukung yang teridentifikasi dalam pelaksanaan usaha ekonomi produktif tiga kelompok usaha bersama pada Komunitas Adat Terpencil di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan adalah berupa dukungan finansial dari pemerintah (Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan), antara lain : berupa modal usaha, yang berupa barang (Bab 4 hal 101). Dalam perspektif pengembangan masyarakat hal tersebut diistilahkan Adi dan Lawang (Bab 2 hal 37), sebagai modal finansial (*financial capital*), dalam konteks ini dukungan keuangan berasal dari bantuan murni dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk ketiga kube memulai usaha ekonomi produktifnya, berdasarkan Perda No. No. 32 tahun 2007 tentang APBD Kab. HSS, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah No. 028 Tahun 2007 tentang penjabaran APBD Kab. HSS tahun 2008, yang secara operasional dimasukkan dalam DPA SKPD Dinkessos dan PM Kab.HSS No. 1.13.1.13.01.15.01.52 tanggal 2 januari 2008.

Untuk memulai usaha, faktor stimulus modal yang diberikan pemerintah tentu sangat membantu kelompok, tetapi hal tersebut tentu tidak cukup, terutama untuk mengantisipasi perkembangan naik turunnya usaha, kelompok perlu mencari alternatif tambahan modal untuk pengembangan usaha, baik secara swadaya maupun lembaga keuangan lainnya. Karenanya, peran pendamping adalah mencarikan alternatif akses modal bagi kelompok usaha. Dalam kenyataan hal tersebut tidak dilaksanakan, pelaksanaan usaha hanya dilakukan terhadap modal yang diberikan pemerintah. Dalam konteks ini, pendamping perlu memberikan pemahaman yang benar tentang perlunya keswadayaan kelompok untuk membentuk modal usaha dari kelompok

sendiri atau bisa juga pendamping menjadi penghubung kelompok untuk mendapatkan akses modal, baik dari : perbankan maupun lembaga keuangan resmi lainnya.

5.2.1.2. Kemauan anggota kelompok

Faktor pendukung lainnya adalah menyangkut kemauan anggota kelompok untuk berusaha, terutama terlihat ketika membentuk kelompok, pengurus, memilih jenis usaha yang akan dilaksanakan, pengusulan modal bantuan usaha, hingga pada awal pelaksanaan usaha. Kemauan anggota tersebut tentu menjadi energi kekuatan yang menjadi pendorong bagi kelompok dalam pelaksanaan usaha (Bab 4 hal 102). Timbulnya kemauan anggota untuk berusaha dimungkinkan karena tumbuhnya keinginan menambah pendapatan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, keinginan untuk hidup layak dan lebih baik.

Tumbuhnya motivasi anggota tersebut selaras dengan apa yang dikemukakan Hikmat (Bab 2 hal 41) yang mengatakan tuntutan hidup melahirkan adanya rasa bersaing (bermotivasi) untuk menyesuaikan dengan tuntutan kehidupan, dalam perspektif kewirausahaan hal tersebut juga sesuai dengan yang dikemukakan McClelland melalui konsep motif berprestasi (Bab 2 hal 50).

Namun, dalam perjalanan waktu selama pengelolaan usaha, pendamping tidak mampu menjaga, memelihara dan memanfaatkan kemauan (motivasi) anggota kelompok sebagai energi positif dalam pelaksanaan usaha ekonomi produktif di masing-masing kube. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kompetensi pendamping dan intensitas proses pendampingan, sebab untuk mendukung pelaksanaan usaha dan menjadikan kemauan (motivasi) sebagai energi positif perubahan diperlukan pembangkitan, pemeliharaan dan peningkatan melalui penyadaran, motivasi dan bimbingan selama proses pendampingan, yang dilakukan secara berkala, intensif dan berkualitas serta berkelanjutan.

Ke depan, kemauan anggota perlu dibangkitkan kembali agar berkembang. Kompetisi dan penciptaan rasa bersaing di kalangan anggota

kelompok dapat terus dikembangkan agar pelaksanaan usaha ekonomi produktif di masing-masing kube dapat berhasil dalam penguatan ekonomi kelompok dan komunitas.

5.2.2. Faktor penghambat

Beberapa faktor penghambat yang menjadi temuan di lapangan dalam kaitan pelaksanaan usaha ekonomi produktif tiga kelompok usaha bersama pada komunitas adat terpencil di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan antara lain teridentifikasi sebagai berikut :

5.2.2.1. Faktor kebiasaan (khusus kube Serumpun dan Maju Bersama)

Kebiasaan yang menjadi penghambat utama dialami oleh kube Serumpun dan Maju Bersama adalah menyangkut rutinitas pekerjaan yang merupakan mata pencaharian utama anggota dan komunitas, yaitu bertani padi pegunungan dan menyadap karet yang sudah dilakukan secara turun temurun. (Bab 4 hal 103-104 dan 107)

Walaupun pada awal pelaksanaan usaha, anggota terlihat antusias ikut terlibat, semenjak pembentukan kelompok, pengurus, pemilihan jenis usaha, dan pelaksanaan usaha, dalam perkembangan selanjutnya, anggota kelompok ternyata lebih aktif dengan kegiatannya masing-masing dan mempercayakan pengelolaan usaha kepada ketua kube masing-masing. Melihat kondisi tersebut, paling tidak terdapat dua alasan utama yang dapat diidentifikasi :

- Usaha ekonomi produktif merupakan suatu bentuk usaha yang relatif masih baru bagi anggota kube, sehingga sebagai usaha yang baru dirintis tentu tidak dapat langsung menghasilkan, sementara anggota juga tetap harus mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga pilihan untuk lebih memfokuskan kepada kegiatan mata pencaharian utama adalah suatu pilihan rasional untuk mengatasi hal tersebut.
- Usaha ekonomi produktif selama hampir setahun sampai dengan penelitian dilakukan belum dapat membuktikan bahwa usaha tersebut

mampu menjadi alternatif usaha yang berdampak menambah pendapatan anggota dan kelompok, sehingga anggota akhirnya melalui rasionalisasi pikiran mereka lebih memfokuskan pada mata pencaharian utama, yaitu : bertani dan menyadap karet, yang memang relatif sudah mapan dan dipastikan dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam konteks pengembangan masyarakat, fokus anggota kelompok pada kegiatan bertani dan menyadap karet merupakan gambaran bahwa anggota kelompok menerapkan konsep "otonomi fungsional" sebagaimana dikemukakan Watson dalam Adi (Bab 2 hal 38), yaitu : anggota kedua kube tersebut bereaksi sesuai dengan kebiasaan yang mereka anggap paling menguntungkan, yaitu : bertani dan menyadap karet, dibandingkan dengan usaha ekonomi produktif yang belum pasti memberikan tambahan pendapatan.

Untuk mengatasi hambatan kebiasaan, tentu membutuhkan waktu lama, cara yang efektif antara lain : menunjukkan bahwa usaha ekonomi produktif mampu menambah pendapatan anggota kelompok. Untuk itu, pendampingan usaha kepada kube-kube tersebut harus intensif dan berkesinambungan.

5.2.2.2. Faktor terbatasnya sumber daya dalam proses pendampingan

Faktor penghambat kedua yang dialami oleh ketiga kube tersebut adalah menyangkut faktor terbatasnya sumber daya dalam proses pendampingan. Beberapa yang dapat diidentifikasi antara lain :

- Pendamping tidak berada di lokasi ketika kelompok mengalami hambatan usaha, banyaknya tugas para pendamping diluar tugas pendampingan menyebabkan proses pendampingan tidak optimal, para pendamping terikat dengan pekerjaan masing-masing yang tergolong padat.
- Terbatasnya alokasi dana untuk pendampingan (yang hanya dialokasikan rata-rata sekitar Rp.100ribu sebulan, suatu jumlah yang sangat minim untuk melakukan pendampingan dengan menempuh jarak 13-15 km (khusus pendamping Az dan Ka).

- Terbatasnya kualitas sumber daya manusia pendamping dan anggota kelompok, dimana 2 dari 3 pendamping berpendidikan SMP (Az dan Ka) hanya RH yang SMA, sementara sebagian besar anggota kelompok berpendidikan SD. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak adanya upaya bimbingan teknis, baik bagi pendamping maupun kelompok untuk melakukan usaha ekonomi produktif secara baik. (Bab 3 tabel 3.2. hal 69, tabel 3.3 hal 71, tabel 3.4. hal 75 dan Bab 4 hal 105-106, 110-111, 112-114).

Faktor terbatasnya sumber daya dalam proses pendampingan tersebut mempertegas penghambat perubahan yang dilakukan pada suatu komunitas sebagaimana dikemukakan Hikmat (Bab 2 hal 41-42).

Kondisi tersebut di atas menyebabkan pendamping tidak mampu menjalankan keterampilan sebagai pendamping (*community worker*) sebagaimana ditegaskan Ife dan Mayo dalam Adi (Bab 2 hal 43-44), yaitu : animasi sosial untuk membangkitkan dan mempertahankan energi, inspirasi dan antusiaisme masyarakat dalam berusaha (sebagaimana ditemukan ketika di awal pelaksanaan uep), lemah dalam memfasilitasi kelompok untuk mencapai tujuan (terutama untuk meningkatkan pendapatan dan mewujudkan kesejahteraan), lemah dalam pemanfaatan sumber daya dan keterampilan yang dimiliki kelompok untuk mengatasi hambatan usaha dan mendukung kesinambungan usaha, merupakan penyebab bahwa usaha pada akhirnya mengalami stagnansi, sementara pendamping tidak mampu memberikan gambaran alternatif sumber daya yang dimiliki kelompok untuk dimanfaatkan mengatasi permasalahan sehingga usaha dapat kembali beroperasi dengan jenis usaha baru yang lebih prospektif, lemah keterampilan dalam melakukan penilaian (*assessment*) dimana penilaian justru berorientasi sesaat, termasuk penilaian kebutuhan, lemah keterampilan manajemen, pemantauan dan evaluasi usaha sehingga uep berjalan tanpa perencanaan, tanpa pengorganisasian yang benar, tanpa pemantauan dan evaluasi sehingga perkembangan usaha tidak jelas arah bahkan mengalami kegagalan.

Sementara, rendahnya sumber daya pengelola usaha (kelompok kube) menyebabkan ketika usaha mengalami hambatan, kelompok tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi dan mencari alternatif pemecahannya. Faktor rendahnya sumber daya pengelola tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Sujana, Zimmerer dalam Suryana dan Suryana (Bab 2 hal 50-51) bahwa aspek sumber daya manusia dalam pengelolaan usaha merupakan salah satu faktor diantara beberapa faktor yang menyebabkan usaha mengalami hambatan dan kegagalan. Hal inilah kemudian menyebabkan pelaksanaan usaha ekonomi produktif ketiga kube tersebut mengalami stagnansi.

Melihat kondisi di atas maka ke depan untuk mengatasi masalah ini para pendamping selain dipilih melalui seleksi dengan persyaratan yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pelatihan pendampingan usaha dan kewirausahaan. Selain itu, alokasi anggaran untuk pendampingan usaha perlu pertimbangan realistis, proporsional dan memadai. Sementara rendahnya sumber daya manusia di kelompok sasaran diatasi dengan bimbingan teknis pelaksanaan usaha dan kewirausahaan sebelum pelaksanaan usaha di tingkat kelompok sasaran.

5.2.2.3. Faktor kesepakatan terhadap nilai yang berlaku (khusus kube Maju Bersama)

Faktor penghambat ini dialami khusus pada kube Maju Bersama dengan jenis usaha jual beli beras. Hambatan ini berkaitan erat dengan kebiasaan masyarakat setempat, dimana anggota dan warga komunitas dalam melakukan kegiatan pertanian padi, ternyata tidak untuk dijual tetapi disimpan untuk kebutuhan sendiri selama jangka satu tahun atau panen berikutnya. Kebiasaan turun temurun ini diakui sudah menjadi semacam tata nilai tidak tertulis, walaupun dijual dipastikan padi tersebut adalah sisa panen tahun lalu yang merupakan kelebihan dari panen yang lalu.

Dalam konteks pengembangan masyarakat, faktor kesepakatan terhadap nilai yang berlaku tersebut diistilahkan Watson dalam Adi (Bab 2 hal 40) sebagai kesepakatan terhadap norma tertentu.

Kondisi ini agaknya bertolak belakang dengan apa yang dilakukan Dinas Pertanian setempat, yang berusaha menjadikan kawasan pegunungan yang mampu memproduksi padi yang dapat mendukung ketahanan pangan setempat melalui penggunaan bibit unggul “*situ begended*” dan penerapan pertanian terpadu. Hasilnya ternyata sangat menggembirakan, dimana dengan luasan yang sama, produksi padi dapat dinaikkan dua kali lipat (Bab 4, hal 108-109).

Melihat dua kondisi yang saling bertolak belakang tersebut, sebenarnya dapat ditarik benang merah yang justru sangat komplementer dan mendukung satu sama lain, yaitu :

- Walaupun tata nilai ada kesepakatan tidak tertulis yang sudah menjadi kebiasaan kelompok dan komunitas untuk tidak menjual padi setelah panen, tetapi hal tersebut tidak begitu kaku dilakukan, indikasinya antara lain : masih dimungkinkan bagi kelompok dan komunitas untuk menjual apabila memiliki kelebihan padi dari panen sebelumnya. Hal ini memberikan gambaran bahwa faktor tata nilai yang dianut anggota dan komunitas tersebut masih dapat dirubah, apalagi dalam kaitan menambah pendapatan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.
- Pola pertanian dengan menggunakan bibit unggul dan pertanian terpadu dapat dijadikan alternatif perubahan tata nilai, sebab dengan pola tersebut yang terapkan pada luasan areal pertanian yang sama mampu menghasilkan produksi padi hampir dua kali lipat. Artinya, apabila dahulu dengan luasan tersebut anggota dan komunitas dapat mencukupi kebutuhan selama setahun maka dengan penggunaan pola ini, yang dapat menghasilkan dua kali lipatnya, sebagian untuk kebutuhan sendiri, kelebihan produksi tersebut juga dapat dijual.
- Komplementernya antara tata nilai yang dapat dirubah ke arah positif dan pola pertanian yang dikembangkan tersebut akan mampu memberi nilai tambah bagi pendapatan anggota dan komunitas, sehingga dengan tambahan *income*, anggota dan komunitas dapat mencukupi kebutuhannya, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan lainnya.

- Majunya bidang pertanian dan perubahan tata nilai ke arah positif, dimana anggota dan komunitas terbiasa untuk menjual padi maka pada akhirnya dapat meningkatkan transaksi jual beli beras pada kelompok, khususnya menjadikan kelompok ini agen (penyalur) bagi kebutuhan beras daerah-daerah sekitarnya, antar desa, kecamatan maupun kabupaten.

Berdasarkan kondisi tersebut sebenarnya usaha jual beli beras sangat prospektif dan perlu menjadi pertimbangan untuk pengembangan usaha tersebut ke depan. Untuk itu, perubahan tata nilai ke arah positif dapat mulai dilakukan, melalui proses pendampingan dan penyadaran, baik terhadap kelompok maupun komunitas pada umumnya. Dalam konteks ini perubahan tata nilai dari tidak menjual padi setelah panen ke arah terbiasanya kelompok dan komunitas untuk menjual padi dapat menjadi modal sosial dalam pengembangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Adi, Lawang dan Suharto bahwa modal sosial dapat menjadi salah satu aset dalam pembangunan, khususnya dalam kegiatan ekonomi dan produksi (Bab 2 hal 37-38).

Untuk mendukung hal tersebut, ke depan perubahan tata nilai ke arah positif dan pemanfaatan potensi sektor pertanian perlu menjadi pertimbangan dalam upaya pelaksanaan usaha ekonomi produktif kube-kube pada komunitas adat terpencil di Desa Hamak Utara tersebut.

5.2.2.4. Faktor Persepsi kekecewaan (khusus kube Pelopor).

Faktor kekecewaan ini merupakan penghambat pelaksanaan usaha khusus di kube Pelopor. Rasa kecewa menyebabkan kelompok tidak termotivasi untuk melakukan pengelolaan usaha kelompok. Hal ini berdasar kenyataan bahwa usaha ekonomi produktif jual beli pupuk kelompok ini dari awal saja sudah bermasalah, baik karena ketidaksesuaian bantuan yang diusulkan (SP36) dengan yang diterima (SP27), begitu juga ketika memperjualbelikannya, ternyata tidak sesuai kebutuhan anggota dan warga (Bab 4, hal 111-112).

Kondisi ini melahirkan persepsi kurang baik kelompok terhadap pemerintah, yang dianggap tidak aspiratif, tumbuh kecurigaan kalau pemerintah sekedar memanfaatkan mereka untuk meraup keuntungan sendiri (karena persepsi mereka bahwa pupuk yang diberikan berkategori murah sementara nilainya dianggap 5 juta), persepsi yang sama juga terjadi bagi pendamping yang dianggap ceroboh sebagai penghubung pembuatan proposal bantuan kepada pemerintah karena ketidaktelitian dalam penulisan kode SP36 yang merupakan pupuk yang dikehendaki dengan hanya menuliskan SP saja. Dalam perspektif pengembangan masyarakat, kondisi kelompok seperti itu dikemukakan Watson dalam Adi (Bab 2 hal 39) sebagai seleksi ingatan dan persepsi, yang berkonotasi "negatif", baik terhadap pemerintah maupun pendamping.

Ke depan dalam pengusulan bantuan modal usaha perlu dilakukan secara cermat, pihak-pihak yang terlibat perlu saling berkomunikasi secara lebih terbuka dengan tetap memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan potensi masyarakat penerima bantuan tersebut.

5.2.2.5. Terbatasnya kerjasama, baik kelompok kube maupun antar instansi terkait

Fakta menunjukkan bahwa, kerjasama antar kelompok terbatas di kalangan mereka sendiri, kube Serumpun, membeli sembako kepada penjual di kota untuk dijual kembali di desa, kube Maju Bersama dengan penjual beras di kota sementara kube Pelopor terbatas dengan pembeli karet yang datang ke desa tersebut, sedangkan dengan kelompok-kelompok lain tidak ada, baik dengan pedagang sembako lain di lokasi yang berbeda, kelompok tani setempat, penyuluh, dan kalangan pengusaha yang lebih besar. Hal ini ditambah dengan tidak adanya kerjasama yang dibangun Dinas Kessos dan PM Kab. HSS dengan instansi lain untuk mendukung pelaksanaan usaha ekonomi produktif agar berhasil, misalnya dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. HSS, Dinas Pertanian Tanaman pangan Kab. HSS, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. HSS untuk membentuk jaringan kerjasama yang saling bersinergi guna memadukan

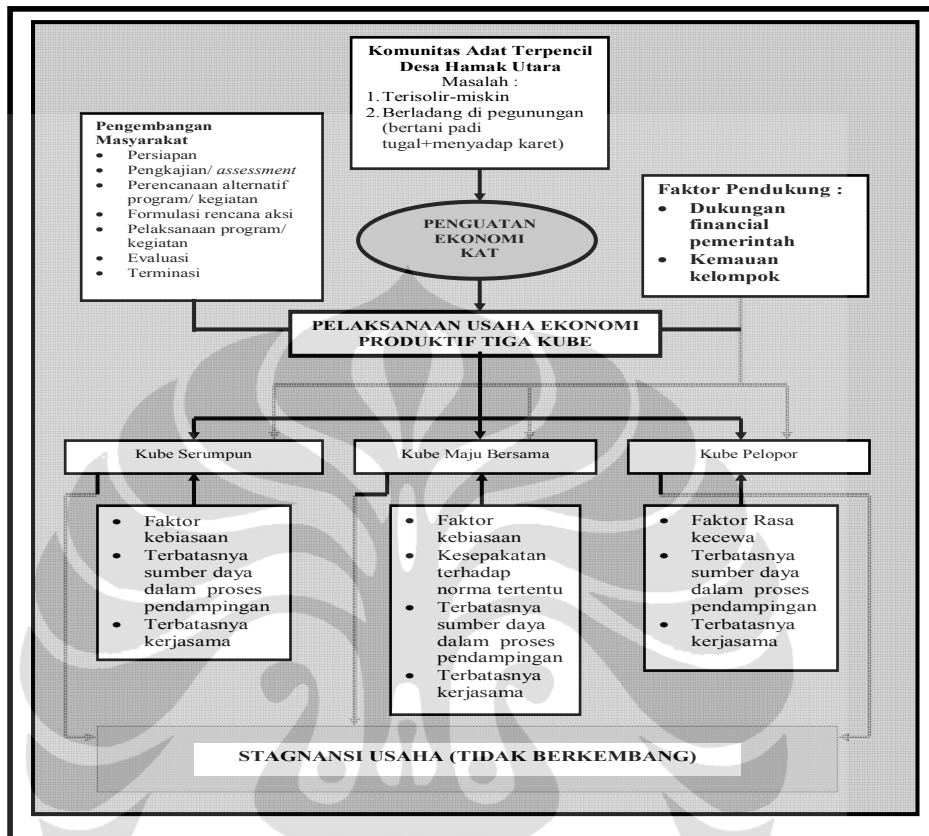
potensi pembangunan sektor perdagangan, pertanian (padi) dan perkebunan (karet) yang dapat meningkatkan pendapatan uap kube yang bergerak di bidang yang terkait dengan ketiga sektor tersebut.

Prospek pembangunan pertanian seharusnya dijumpai oleh Dinas Kessos dan PM Kab. HSS melalui kerjasama di level atas (melibatkan dua institusi tersebut) yang diikuti pada level bawah (kelompok uap kube, kelompok tani, pendamping dan penyuluh lapangan pertanian) agar program kedua institusi tersebut dapat saling komplementer dan bersinergi, baik dimulai dari atas hingga ke *grass root*. Begitu juga dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan melalui usaha penyadapan karet dan hasil olahan lanjutannya. Kerjasama dapat dibentuk dengan turut melibatkan pihak ketiga (kalangan swasta) untuk terlibat dalam usaha sektor pertanian (padi) dan perkebunan (karet) beserta hasil olahannya yang menguntungkan kube pelaku usaha ekonomi produktif tersebut. Sistem kerjasama yang dikembangkan tentu berorientasi saling menguntungkan dan mengembangkan jaringan kerjasama pemasaran secara transparan dan akuntabel. Sementara peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dapat berbentuk pembinaan kewirausahaan bagi kalangan usaha kecil dan mikro, fasilitasi terhadap akses modal dan pasar secara lebih luas

Dengan melihat potensi setempat, yang merupakan kawasan pertanian padi gogo (pegunungan) dan perkebunan karet sehingga prospek usaha kedua sektor ini sangat menjanjikan di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan hal tersebut maka kerjasama dan pembentukan jaringan kerja dengan pihak terkait, tidak saja antar instansi pemerintah tetapi juga perlu melibatkan kalangan swasta, yang memiliki kepedulian dan komitmen untuk mengembangkan sektor pertanian (padi) dan perkebunan (karet) ke arah kemajuan sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan kelompok dan komunitas yang melakukan aktivitas usaha ekonomi yang terkait dengan kedua sektor tersebut.

Karenanya, faktor kerjasama sebagaimana tersebut di atas merupakan salah satu aspek penting dalam pemberdayaan ekonomi rakyat sebagaimana dikemukakan Firdaus dalam Kuwanda (Bab 2 hal 49).

Secara ringkas faktor pendukung/penghambat pelaksanaan usaha ekonomi produktif tiga kube tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 5.2. Skema ringkasan faktor pendukung/penghambat pelaksanaan usaha ekonomi produktif tiga kelompok usaha bersama pada komunitas adat terpencil di Desa Hamak Utara

Sumber : telah diolah kembali

5.3. Dampak Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif bagi Tiga Kelompok Usaha Bersama pada Komunitas Adat Terpencil di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan.

5.3.1. Dampak langsung pada kelompok

5.3.1.1. Dampak ekonomi

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa pada kube Serumpun dari bantuan 5 juta yang diberikan sekarang dananya tersisa tinggal Rp. 3.500.000,- artinya terjadi penurunan aset setelah pelaksanaan usaha sekitar

Rp. 1.500.000- atau menyusut sekitar 30% dari modal awal, sementara pada kube Maju Bersama dari bantuan 5 juta yang diberikan sekarang dananya tersisa tinggal Rp. 2.161.000,- artinya terjadi penurunan aset setelah pelaksanaan usaha sekitar Rp. 2.839.000,- atau menyusut sekitar 56,78% dari modal awal, sedangkan kube Pelopor dari bantuan 5 juta yang diberikan sekarang dananya tersisa tinggal Rp. 1.500.000,- artinya terjadi penurunan aset setelah pelaksanaan usaha sekitar Rp. 3.500.000,- atau menyusut sekitar 70% dari modal awal. Berdasarkan ukuran aset kepemilikan modal usaha jelas ketiga kube tersebut mengalami kemunduran atau bahkan dapat dikategorikan gagal dalam mengembangkan aset usaha (Bab 4 hal 117-118, 120, 122-123).

Namun demikian, kube Serumpun masih tergolong lebih baik dibandingkan kube Maju Bersama dan Pelopor sebab selama pelaksanaan usaha telah memiliki sebuah kios sebagai media jual beli yang representatif, di depan rumah ketua yang bersangkutan, selain itu selama pelaksanaan usaha juga pernah melakukan pembagian keuntungan sebesar Rp. 30.000,- /tiga bulan walaupun bersifat insedentil (dampak tersebut tentu berkategori positif bagi anggota dan kelompok), sedangkan kube Maju Bersama dan Pelopor tidak mampu menghasilkan sebuah kios sebagai tempat jual beli yang representatif, sehingga saat pelaksanaan usaha menumpang di balai pertemuan kat, selain itu selama pelaksanaan usaha tidak pernah melakukan pembagian keuntungan bagi anggota.

Melihat kenyataan ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan usaha ekonomi produktif ketiga kube tersebut gagal dalam penguatan ekonomi anggota dan kelompok, terutama memberi dampak pada peningkatan pendapatan yang dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, hidup layak, lebih baik dan sejahtera, sebagaimana ditegaskan Cochrane dalam Conyers dan Deliyanto (Bab 2 hal 45).

Dengan melihat ukuran kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya ataupun dalam perspektif untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik sebagaimana dikemukakan Adi (Bab 2 hal 28) maka pelaksanaan uep ketiga kube tersebut tidak mampu memenuhi indikator terpenuhinya kebutuhan material maupun taraf kehidupan yang lebih baik tersebut, baik terhadap anggota maupun kelompok.

5.3.1.2. Dampak sosial

Walaupun pelaksanaan usaha ekonomi produktif kelompok usaha bersama belum mampu memberikan penguatan ekonomi, tetapi kenyataan juga memberikan gambaran justru pelaksanaan usaha ekonomi produktif berdampak positif secara sosial pada tiga kube tersebut. Faktanya dalam kelompok tumbuh kebersamaan, sikap tolong menolong, saling mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan usaha sehari-hari, bekerjasama, bersosialisasi, berinteraksi, dan belajar berdemokrasi melalui rapat-rapat kelompok (Bab 4 hal 118, 120-121, 123). Jadi, tumbuhnya sikap, interaksi, bekerjasama, tolong menolong dan hidup bersama merupakan dampak sosial yang dapat dirasakan kelompok dan komunitas dengan adanya pelaksanaan usaha ekonomi produktif tersebut. Dampak sosial ini sesuai dengan yang dikemukakan Adi, sebagai ukuran kesejahteraan yang bersifat non ekonomi (Bab 2 hal 28).

Selain itu, khusus pada kube Pelopor, pada kelompok ini ditemukan fakta bahwa pelaksanaan usaha ekonomi produktif jual beli pupuk membawa dampak negatif pada perilaku kelompok dan anggota dalam melaksanakan jual beli karet secara tidak jujur. Dimana pupuk yang seharusnya digunakan untuk menyuburkan tanaman pertanian dan perkebunan digunakan sebagai media pencampur pembekuan karet. Penggunaan pupuk SP36, bahkan kadang dengan menggunakan "gadung" sebagai pencampur pembekuan karet ternyata menghasilkan karet beku yang lebih berat namun juga sekaligus menurunkan kadar lateks. Perilaku ini jelas menyimpang, karena karet beku yang siap jual sebenarnya tidak sesuai berat yang sebenarnya, selain itu juga melahirkan karet yang tidak sesuai standar kualitas. Apabila terus dilakukan

akan menumbuhsurburkan perilaku saling tidak jujur dalam transaksi jual beli karet yang akan merugikan semua pihak, tidak saja antara penjual dan pembeli, tetapi juga merugikan kalangan pengusaha pengguna karet untuk dijadikan olahan lanjutan, artinya merugikan, semenjak dari hulu hingga ke hilir produksi karet dan ikutannya. Dalam perspektif modal sosial dalam kegiatan ekonomi, pada kelompok ini jelas nilai kepercayaan antara penjual dan pembeli rendah (bahkan nyaris tidak ada). Hal ini justru, tidak saja merusak proses jual beli yang seharusnya dibangun secara bersama antara penjual dan pembeli, namun juga merusak karet itu sendiri, karena tidak sesuai standar kualitas.

Ke depan pendamping perlu mengembangkan kerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan terkait, untuk mengurangi perilaku menyimpang ini, melalui penerapan teknologi dalam pembekuan karet yang lebih baik, misalnya : menggunakan model pengasapan. Dengan teknik ini karet yang dihasilkan lebih bersih, lebih putih, tidak berbau dan karet yang dihasilkan sesuai standar pemasaran, sehingga kegiatan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan secara positif.

5.3.2. Dampak tidak langsung di luar kelompok







5.3.2.1. Dampak pada lingkungan

Berdasarkan kenyataan pelaksanaan usaha ekonomi produktif kini tidak beroperasi dan selama pelaksanaan belum mampu memberi dampak terhadap pendapatan, sementara kebutuhan mulai meningkat, sedangkan karet sebagai primadona mata pencaharian anggota, harga di pasaran rendah menyebabkan anggota kemudian mencari alternatif usaha lain, yaitu menebang pohon hutan untuk dijual (Bab 4 hal 119-120,121-122, dan 125-126), hal ini juga ditunjang dengan baiknya jalan sebagai akses transportasi dan komunikasi di lokasi setempat sehingga mempermudah dalam transaksi. Kegagalan pelaksanaan usaha ekonomi produktif dalam memberi dampak pada peningkatan pendapatan, ternyata secara tidak langsung bersama-sama faktor lainnya menyebabkan aktivitas penebangan pohon hutan mulai marak, yang dikhawatirkan akan merusak lingkungan hutan. Kondisi ini apabila

terus dibiarkan akan mengancam kelangsungan kawasan hutan di desa tersebut, padahal daerah ini merupakan kawasan hutan lindung, yang harus dijaga kelangsungan dan kelestariannya. Dampak lebih jauh rusaknya hutan di kawasan ini akan berakibat hilangnya sumber mata air setempat (fungsi hidrologi), tempat tinggal untuk hidup dan berkehidupan, bersosialisasi, bermata pencaharian, berbudaya melalui *local wisdom*-nya, dan sebagainya, sementara di hilir kawasan, terancam banjir pada saat musim hujan sebagai akibat kerusakan hutan di kawasan desa setempat.

Secara singkat, ternyata gagalnya pelaksanaan usaha ekonomi produktif pada ketiga kelompok ini membawa dampak negatif terhadap semakin maraknya penebangan hutan yang berakibat rusaknya lingkungan hutan. Hal ini selaras dengan penegasan Deliyanto dan Emil Salim dalam Deliyanto bahwa kerusakan lingkungan hutan merupakan salah satu dampak negatif dalam pembangunan (Bab 2 hal 45-46). Padahal sejatinya, pemberdayaan, tidak terkecuali dalam perspektif ekonomi harusnya memperhatikan pemberdayaan lingkungan agar tidak terjadi eksploitasi yang besar-besaran terhadap sumber daya yang ada, yang dapat mengancam kelangsungan generasi-generasi yang akan datang. Dalam konteks ini selayaknya pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab untuk generasi yang akan datang. Untuk itu, pembangunan, baik oleh individu, kelompok, masyarakat, maupun negara diupayakan untuk mempertimbangkan lingkungan dalam pembangunan. Dalam perspektif lain, bahwa perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik seharusnya melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana ditegaskan Adi, Midgley dan Deliyanto (Bab 2 hal 46).

Berikut gambaran ringkas dampak pelaksanaan usaha ekonomi produktif bagi ketiga kube di Desa Hamak Utara sebagaimana matrik berikut :

DAMPAK UEP BAGI KELOMPOK :			
	Kube Serumpun	Kube Maju Bersama	Kube Pelopor
SECARA LANGSUNG	DAMPAK EKONOMI PADA KELOMPOK (positif)		
	Berdampak bagi kelompok berupa telah dimilikinya toko yang permanen untuk tempat jual beli sembako, bagi anggota pernah ada secara insidental berdampak bagi pendapatan anggota, Sisa dana usaha kelompok yang tersedia Rp.3.500.000,-	Tidak berdampak bagi pendapatan kelompok (tidak ada toko permanen yang dimiliki, menumpang di balai KAT) dan tidak ada dampak bagi pendapatan anggota, sisa dana usaha kelompok yang tersedia Rp. 2.161.000,-	Tidak berdampak bagi pendapatan kelompok (tidak ada toko permanen yang dimiliki, menumpang di balai KAT) dan tidak ada dampak bagi pendapatan anggota, sisa dana usaha kelompok yang tersedia Rp. 1.500.000,-
	DAMPAK SOSIAL PADA KELOMPOK (positif dan negatif)		
	Sisi positifnya : Kelompok lebih akrab, saling berkomunikasi, bersosialisasi, berdemokrasi dan terbina sikap tolong menolong		
SECARA TIDAK LANGSUNG			Sisi negatifnya : pencampuran pupuk SP36 sebagai alat membekukan karet membawa dampak negatif semakin suburnya perilaku menyimpang dalam jual beli karet (tidak fair/jujur) karena karet menjadi lebih berat dan tidak sesuai standar kualitas
	DAMPAK DI LUAR KELOMPOK, KHUSUSNYA PADA LINGKUNGAN (negatif)		
Gagalnya uep dan rendahnya harga karet sebagai mata pencaharian utama warga (anggota) serta baiknya transportasi + komunikasi menyebabkan penebangan kayu hutan setempat untuk dijual dalam upaya mencukupi kebutuhan sehari-hari mulai marak			
			
			

Gambar 5.3. Matrik ringkasan dampak pelaksanaan usaha ekonomi produktif bagi tiga kelompok usaha bersama pada Komunitas adat terpencil di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber : telah diolah kembali